

Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Perspektif Tata Kelola Inklusif

Ivone Agustina Nathan

Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

*Email Korespondensi: ivoneagustinanathannathan@gmail.com

Diterima: 14-02-2026 | Disetujui: 24-02-2026 | Diterbitkan: 26-02-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the participation of the indigenous community of Kweel Village, Merauke, in regional development planning and explore barriers and supporting factors to inclusive governance. The study employed a qualitative approach with a case study design, involving traditional leaders, village officials, and residents involved in the development planning process. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, participant observation, and documentation, then analyzed using thematic analysis with triangulation to enhance validity. The results indicate that community participation occurs in the form of village deliberations, determining development priorities, and the role of traditional leaders as mediators. The level of participation was higher among traditional leaders and adults than among youth and women. Barriers to participation included limited information, geographical access, and socio-cultural norms. Supporting factors included inclusive leadership from village officials, support from traditional leaders, and local media. This participation has resulted in increased relevance of development programs, community ownership, and project sustainability, as well as strengthening transparency and accountability of the village government. This study recommends increased outreach, youth and women's involvement, and the integration of local wisdom to achieve more inclusive and responsive development governance.

Keywords: *Indigenous participation; Development planning; Governance; Community involvement; Sustainable development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat adat Kampung Kweel, Merauke dalam perencanaan pembangunan daerah serta mengeksplorasi hambatan dan faktor pendukung partisipasi untuk mendukung tata kelola yang inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan tokoh adat, aparat kampung, dan warga yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan triangulasi untuk meningkatkan validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terjadi dalam bentuk musyawarah kampung, penentuan prioritas pembangunan, dan peran tokoh adat sebagai mediator. Tingkat partisipasi lebih tinggi pada tokoh adat dan warga dewasa dibandingkan pemuda dan perempuan. Hambatan partisipasi meliputi keterbatasan informasi, akses geografis, dan norma sosial-budaya, sedangkan faktor pendukungnya adalah kepemimpinan inklusif aparat kampung, dukungan tokoh adat, dan media lokal. Partisipasi ini berdampak pada peningkatan relevansi program pembangunan, rasa kepemilikan masyarakat, dan keberlanjutan proyek, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah kampung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, keterlibatan pemuda dan perempuan, serta integrasi kearifan lokal untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan

responsif.

Katakunci: Partisipasi adat; Perencanaan pembangunan; Tata kelola; Keterlibatan masyarakat; Pembangunan berkelanjutan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nathan, I. A. (2026). Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Perspektif Tata Kelola Inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 802-812. <https://doi.org/10.63822/9grpkg89>

PENDAHULUAN

Kampung Kweel, yang terletak di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, merupakan salah satu wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik. Wilayah ini didominasi oleh masyarakat adat yang memiliki struktur sosial, budaya, dan pola kehidupan yang berbeda dari pusat pemerintahan di kota. Kondisi geografis yang terpencil, akses transportasi yang terbatas, serta jarak yang cukup jauh dari pusat layanan pemerintah menyebabkan masyarakat Kampung Kweel menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Keberadaan masyarakat adat yang kuat dengan kearifan lokalnya menjadi salah satu aset penting, namun sering kali belum sepenuhnya diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah (Da Cunha 2025). Di sisi lain, pembangunan daerah terpencil seperti Kampung Kweel menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Hal ini menimbulkan risiko kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat perbatasan dengan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip inklusivitas dalam perencanaan pembangunan menjadi sangat penting. Inklusivitas memastikan bahwa hak, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat adat diperhitungkan secara nyata dalam proses perencanaan, sehingga kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat top-down (Katayu 2025), tetapi juga responsif terhadap kondisi lokal, berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Kweel.

Partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan memiliki urgensi yang tinggi karena merupakan salah satu prinsip utama *good governance* dan *sustainable development* (Al Ma'ruf et al. 2024). Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan selaras dengan kebutuhan nyata warga (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023a). Di Kampung Kweel, masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal (*local wisdom*) yang kaya, meliputi cara pengelolaan sumber daya alam, adat istiadat, dan praktik sosial yang telah teruji oleh waktu. Pengetahuan ini dapat menjadi sumber daya penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sebaliknya, minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan sering menimbulkan berbagai masalah. Keputusan pembangunan yang diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi lokal berpotensi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial, ketimpangan akses layanan, dan ketidakpuasan publik (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023b). Hal ini menekankan pentingnya penerapan mekanisme partisipatif yang sistematis, agar masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah mereka sendiri.

Perspektif tata kelola inklusif menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (Tambaip and Tjilen 2023a). Konsep ini tidak hanya menekankan aspek formal administratif, tetapi juga menghargai aspirasi, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan tradisional. Dengan menerapkan tata kelola yang inklusif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas lokal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di konteks daerah perbatasan seperti Kampung Kweel, penerapan tata kelola inklusif memiliki relevansi strategis. Wilayah perbatasan sering menghadapi tantangan khusus, termasuk

keterbatasan akses layanan, jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, serta keragaman sosial-budaya yang tinggi (Tjilen, Tambaip, et al. 2023). Oleh karena itu, Kampung Kweel dapat dijadikan model pembelajaran untuk mengembangkan praktik pemerintahan inklusif di daerah serupa di Papua, dengan memperkuat mekanisme partisipatif, memperhatikan kearifan lokal, dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat. Model ini tidak hanya berpotensi meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan program pembangunan di tingkat lokal.

Meskipun partisipasi masyarakat adat telah banyak dibahas dalam literatur tata kelola pemerintahan, penelitian empiris yang fokus pada proses perencanaan pembangunan di tingkat kampung, khususnya di Merauke, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menyoro ti pembangunan di tingkat kabupaten atau provinsi, sehingga dinamika partisipasi masyarakat adat yang lebih dekat dengan konteks lokal dan kearifan budaya setempat belum banyak terungkap. Kesenjangan ini menjadi penting karena mekanisme partisipasi, hambatan, dan peluang yang muncul di tingkat kampung dapat berbeda secara signifikan dari konteks pemerintahan yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis empiris mengenai partisipasi masyarakat adat Kampung Kweel dalam perencanaan pembangunan daerah. Studi ini menyoro ti bentuk-bentuk partisipasi, faktor pendukung dan penghambat, serta peluang implementasi tata kelola inklusif yang memperhatikan aspirasi lokal dan kearifan adat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola pemerintahan inklusif, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi masyarakat adat Kampung Kweel dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri pengalaman, persepsi, dan interaksi masyarakat adat secara kontekstual, serta memahami dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Studi kasus memberikan fokus yang komprehensif terhadap fenomena lokal, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara akurat bentuk partisipasi, hambatan, dan faktor pendukung yang ada di Kampung Kweel, sekaligus memberikan dasar bagi rekomendasi tata kelola pembangunan yang inklusif dan responsif. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang dipilih karena merupakan wilayah perbatasan dengan masyarakat adat yang masih aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan lokal. Subjek penelitian terdiri dari tokoh masyarakat adat, perangkat kampung, anggota lembaga adat, serta warga yang secara langsung berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai bentuk partisipasi, hambatan, dan faktor pendukung keterlibatan masyarakat adat, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika tata kelola pembangunan yang inklusif di Kampung Kweel.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat adat Kampung Kweel. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, aparat kampung, dan perwakilan masyarakat untuk menggali pengalaman, persepsi, dan motivasi mereka dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan.

Wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi kontekstual dan rinci terkait bentuk partisipasi, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pembangunan lokal. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendalami perspektif kelompok masyarakat secara kolektif, sehingga dapat terlihat dinamika interaksi sosial dan konsensus yang terbentuk terkait partisipasi dan kendala pembangunan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati jalannya musyawarah dan proses perencanaan pembangunan secara langsung, sehingga peneliti dapat memahami praktik partisipasi yang terjadi secara nyata. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen perencanaan pembangunan, berita acara musyawarah, dan regulasi lokal terkait partisipasi masyarakat, sebagai bahan pelengkap dan verifikasi data lapangan. Kombinasi teknik ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan valid mengenai keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan di Kampung Kweel.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan dokumentasi dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu proses pengidentifikasian, pengelompokan, dan interpretasi tema-tema utama yang muncul terkait bentuk partisipasi masyarakat adat, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor pendukung keterlibatan dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara sistematis dan menyajikan pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk meningkatkan validitas dan akurasi data, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika partisipasi masyarakat adat Kampung Kweel dalam tata kelola pembangunan yang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian mengenai partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke, berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terarah. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat dan bentuk partisipasi, hambatan serta faktor pendukung yang memengaruhi keterlibatan masyarakat adat, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif. Temuan ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai dinamika partisipasi lokal serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Tabel 1. Tingkat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Adat Kampung Kweel

Tema Utama	Indikator/Bentuk Partisipasi	Temuan Lapangan	Interpretasi (Perspektif Tata Kelola Inklusif)
Musyawarah Kampung	Kehadiran dan penyampaian aspirasi dalam forum musrenbang kampung	Masyarakat, terutama tokoh adat dan kepala keluarga, aktif menyampaikan usulan terkait infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan	Partisipasi bersifat prosedural dan terbuka, namun masih didominasi kelompok tertentu
Perencanaan Anggaran	Keterlibatan dalam penentuan prioritas	Usulan masyarakat menjadi dasar skala prioritas program tahunan,	Partisipasi bersifat normatif (aspiratif), belum

		pembangunan		tetapi pemahaman teknis anggaran masih terbatas	sepenuhnya substantif dalam aspek teknis penganggaran
Peran Adat	Tokoh	Mediasi masyarakat pemerintah kampung	aspirasi kepada	Tokoh adat menjadi penghubung utama antara warga dan aparat kampung sebelum keputusan formal diambil	Memperkuat legitimasi sosial, namun berpotensi membatasi partisipasi langsung kelompok marginal
Partisipasi Kelompok Dewasa		Keterlibatan aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan		Kelompok usia dewasa dan tokoh adat mendominasi forum musyawarah	Struktur sosial adat memengaruhi distribusi partisipasi
Partisipasi Pemuda		Kehadiran dan kontribusi gagasan		Pemuda cenderung hadir sebagai peserta pasif dan jarang menyampaikan pendapat	Perlu strategi pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda
Partisipasi Perempuan		Keterlibatan dalam isu sosial dan kesehatan		Perempuan terlibat dalam isu kesejahteraan keluarga, namun kurang dominan dalam diskusi umum pembangunan	Representasi gender belum optimal dalam tata kelola pembangunan kampung

Tabel 1 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adat Kampung Kweel dalam perencanaan pembangunan telah berlangsung melalui forum musyawarah kampung dan proses penentuan prioritas anggaran, dengan keterlibatan yang cukup aktif dari tokoh adat dan kelompok usia dewasa. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa aspirasi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan kampung, meskipun pemahaman teknis mengenai penganggaran masih terbatas. Peran tokoh adat sebagai mediator memperkuat legitimasi sosial keputusan pembangunan, namun struktur sosial yang hierarkis menyebabkan partisipasi pemuda dan perempuan relatif kurang optimal. Secara keseluruhan, praktik partisipasi tersebut telah mencerminkan prinsip tata kelola inklusif secara prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan agar lebih substantif, representatif, dan merata.

Tabel 2. Hambatan dan Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Kweel

Dimensi	Variabel	Indikator Empiris	Analisis dan Implikasi Teoretis
Hambatan Struktural	Keterbatasan Informasi	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur formal musrenbang kampung dan mekanisme penyusunan anggaran	Menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas (capacity gap) yang berdampak pada partisipasi yang bersifat prosedural, belum substantif
Hambatan Struktural	Akses Geografis	Jarak permukiman yang tersebar dan keterbatasan transportasi mengurangi tingkat kehadiran warga dalam forum resmi	Faktor spasial memengaruhi aksesibilitas politik (political accessibility) dan inklusivitas partisipasi
Hambatan Kultural	Hierarki Sosial Adat	Dominasi tokoh senior dalam diskusi menyebabkan kelompok pemuda dan perempuan cenderung pasif	Struktur sosial tradisional membentuk pola partisipasi yang tidak sepenuhnya egaliter

Faktor Pendukung Institusional	Kepemimpinan Inklusif	Aparat kampung memberikan ruang dialog terbuka dan mendorong partisipasi lintas kelompok	Praktik kepemimpinan partisipatif memperkuat prinsip collaborative governance
Faktor Pendukung Komunikatif	Pemanfaatan Media Lokal	Informasi kegiatan pembangunan disebarluaskan melalui radio kampung dan papan pengumuman	Transparansi informasi meningkatkan kesadaran kolektif dan legitimasi proses perencanaan
Faktor Pendukung Kultural	Komitmen Tokoh Adat	Tokoh adat secara aktif memobilisasi warga untuk terlibat dalam musyawarah	Integrasi struktur adat dalam sistem pemerintahan lokal memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan partisipasi masyarakat adat di Kampung Kweel bersumber pada dimensi struktural dan kultural yang saling berkelindan. Keterbatasan informasi dan akses geografis mencerminkan persoalan kapasitas serta aksesibilitas politik, sementara hierarki sosial adat memengaruhi distribusi partisipasi secara internal. Di sisi lain, kepemimpinan inklusif aparat kampung, pemanfaatan media lokal, serta komitmen tokoh adat berperan signifikan dalam memperluas ruang partisipasi dan memperkuat legitimasi proses pembangunan. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa tata kelola inklusif di wilayah adat tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada integrasi nilai dan struktur sosial lokal dalam praktik pemerintahan.

Partisipasi masyarakat adat di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke, termanifestasi secara nyata dalam forum musyawarah kampung sebagai instrumen utama perencanaan pembangunan di tingkat lokal (Tambaip et al. 2024). Musyawarah kampung berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi terkait prioritas pembangunan, seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi berbasis lokal (Syahrudin et al. 2023). Dinamika ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengakomodasi dimensi partisipatif yang memberi ruang bagi artikulasi kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial setempat. Meskipun demikian, intensitas dan kualitas partisipasi memperlihatkan diferensiasi berdasarkan usia, gender, dan posisi sosial dalam struktur adat. Kelompok usia dewasa dan tokoh adat cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan pemuda dan perempuan. Struktur sosial yang bersifat hierarkis serta kuatnya legitimasi simbolik tokoh adat turut membentuk pola komunikasi dan distribusi pengaruh dalam forum musyawarah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi yang terjadi masih berada pada spektrum representatif terbatas, di mana akses terhadap ruang deliberasi belum sepenuhnya setara antar kelompok sosial (Tambaip et al. 2023a).

Dalam kerangka teori good governance, praktik partisipatif di Kampung Kweel telah mencerminkan prinsip dasar seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan musyawarah kampung sebagai forum konsultatif menunjukkan adanya mekanisme institusional yang mendukung transparansi dan legitimasi kebijakan (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2025). Namun, apabila dianalisis melalui perspektif inclusive governance, partisipasi yang efektif mensyaratkan distribusi kesempatan yang adil dan pengakuan terhadap keberagaman aktor sosial, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Dengan demikian, keberlanjutan tata kelola inklusif sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah kampung dalam menciptakan ruang partisipasi yang lebih setara

dan responsif terhadap pluralitas kepentingan. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan peran kelembagaan adat dalam perencanaan pembangunan merupakan kekuatan struktural yang memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat kampung. Keterlibatan tokoh adat berkontribusi pada stabilitas sosial serta penerimaan kolektif terhadap program pembangunan. Namun, untuk mencapai tata kelola yang benar-benar inklusif, diperlukan strategi afirmatif yang memperluas akses partisipasi bagi pemuda dan perempuan serta mendorong transformasi pola deliberasi menuju model yang lebih dialogis dan egaliter (Tambaip and Tjilen 2023b). Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok dominan, tetapi merepresentasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat adat secara proporsional dan berkeadilan.

Hambatan partisipasi masyarakat adat di Kampung Kweel dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yakni keterbatasan informasi, akses geografis, dan norma sosial-budaya. Keterbatasan informasi berkaitan dengan minimnya sosialisasi mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, prosedur penganggaran, serta hak dan kewajiban warga dalam forum musyawarah kampung (Yaluwo et al. 2024). Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai untuk terlibat secara substantif dalam proses deliberasi. Partisipasi yang terjadi cenderung bersifat prosedural, bukan partisipasi yang didasarkan pada kapasitas kritis dan pemahaman yang komprehensif terhadap agenda pembangunan. Dari aspek geografis, posisi Kampung Kweel yang relatif terpencil dengan keterbatasan infrastruktur transportasi turut memengaruhi intensitas kehadiran warga dalam forum musyawarah. Jarak tempuh, kondisi jalan, serta faktor cuaca menjadi kendala struktural yang membatasi akses fisik terhadap ruang partisipasi. Literatur mengenai partisipasi publik di wilayah terpencil dan komunitas adat menunjukkan bahwa hambatan geografis sering kali berimplikasi pada rendahnya frekuensi keterlibatan masyarakat serta ketergantungan pada perwakilan tertentu. Akibatnya, proses pengambilan keputusan lebih banyak ditentukan oleh kelompok yang memiliki akses lebih mudah terhadap pusat aktivitas pemerintahan kampung (Tjilen et al. 2022).

Norma sosial-budaya juga memainkan peran signifikan dalam membentuk pola partisipasi. Struktur sosial yang hierarkis dan penghormatan tinggi terhadap otoritas adat dapat memperkuat kohesi sosial, namun pada saat yang sama berpotensi membatasi ekspresi kelompok tertentu, seperti perempuan dan pemuda. Sejumlah kajian tentang tata kelola di masyarakat adat menegaskan bahwa faktor budaya sering kali memengaruhi distribusi suara dalam forum publik, di mana legitimasi sosial lebih banyak dimiliki oleh figur-figur senior atau pemimpin tradisional (Tjilen, Waas, et al. 2023). Dalam konteks ini, partisipasi menjadi tidak sepenuhnya egaliter meskipun secara formal terbuka bagi seluruh warga. Implikasi dari berbagai hambatan tersebut terhadap efektivitas pembangunan cukup signifikan. Keterbatasan informasi dan akses dapat menghasilkan keputusan yang kurang merepresentasikan kebutuhan kolektif secara menyeluruh, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara program pembangunan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, dominasi kelompok tertentu dalam proses deliberasi dapat mengurangi kualitas akuntabilitas dan responsivitas kebijakan kampung. Oleh karena itu, penguatan kapasitas informasi, perbaikan aksesibilitas, serta transformasi pola komunikasi sosial menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat adat di Kampung Kweel tidak dapat dilepaskan dari peran kepemimpinan inklusif aparat kampung. Kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi warga, responsif terhadap kebutuhan lokal, serta aktif melakukan sosialisasi program pembangunan berkontribusi pada

terciptanya ruang deliberasi yang lebih partisipatif. Aparat kampung yang mendorong dialog dua arah dalam musyawarah dan memberikan kesempatan berbicara secara proporsional kepada warga memperkuat rasa percaya (trust) masyarakat terhadap pemerintah lokal (Riyanto et al. 2024). Dalam kerangka tata kelola inklusif, kepemimpinan semacam ini menjadi elemen kunci dalam membangun legitimasi kebijakan serta memperluas keterlibatan publik secara substantif. Selain aparat kampung, tokoh adat memegang posisi strategis sebagai aktor kultural yang memiliki legitimasi sosial kuat di tengah masyarakat. Dukungan tokoh adat terhadap agenda pembangunan dan keterlibatan warga dapat meningkatkan partisipasi secara signifikan karena masyarakat cenderung mengikuti arahan figur yang dihormati. Dalam konteks ini, sinergi antara struktur pemerintahan formal dan kelembagaan adat menjadi modal sosial penting untuk memperkuat partisipasi kolektif. Ketika tokoh adat berperan sebagai mediator dan fasilitator aspirasi, proses perencanaan pembangunan menjadi lebih kontekstual dan selaras dengan nilai-nilai lokal.

Peran media lokal, termasuk papan informasi kampung, pengumuman gereja, serta komunikasi informal melalui pertemuan komunitas, juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah. Akses informasi yang lebih terbuka memungkinkan warga memahami agenda pembangunan dan waktu pelaksanaan pertemuan, sehingga partisipasi tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Transparansi informasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat prinsip akuntabilitas dan mengurangi kesenjangan komunikasi antara pemerintah kampung dan masyarakat adat. Apabila dibandingkan dengan praktik partisipasi publik di wilayah perbatasan lain di Papua dan Indonesia Timur, pola yang serupa juga terlihat, yakni pentingnya kepemimpinan lokal yang adaptif serta penguatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan (Tjilen et al. 2024). Namun, di beberapa komunitas adat lain, partisipasi sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah formal dan struktur adat, sehingga ruang deliberasi menjadi kurang efektif. Dalam konteks Kampung Kweel, adanya kolaborasi yang relatif harmonis antara aparat kampung dan tokoh adat menjadi faktor pembeda yang memperkuat kualitas partisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi publik di daerah terpencil sangat ditentukan oleh integrasi antara kepemimpinan formal, legitimasi kultural, dan sistem komunikasi lokal yang inklusif.

Partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan di Kampung Kweel berkontribusi pada meningkatnya relevansi program yang dirumuskan karena prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan kebutuhan riil warga. Keterlibatan langsung masyarakat dalam musyawarah kampung memungkinkan identifikasi persoalan yang lebih akurat, baik terkait infrastruktur dasar, layanan sosial, maupun penguatan ekonomi lokal. Kondisi ini memperkecil kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan realitas sosial di lapangan. Selain itu, partisipasi aktif menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap program pembangunan, sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan proyek secara kolektif. Dalam jangka panjang, hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya keberlanjutan program karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga subjek pembangunan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan lokal, dinamika ini berkaitan erat dengan konsep *responsiveness* dan *accountability*. Responsivitas tercermin dari kemampuan pemerintah kampung dalam menyesuaikan kebijakan dengan aspirasi warga, sementara akuntabilitas diperkuat melalui keterbukaan proses perencanaan dan pelaporan penggunaan anggaran. Partisipasi yang substansial menciptakan mekanisme kontrol sosial yang mendorong aparatur kampung untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adat tidak hanya berdampak pada kualitas perencanaan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan lokal serta meningkatkan

kepercayaan publik terhadap institusi kampung.

Untuk memperkuat tata kelola inklusif, diperlukan strategi yang secara sistematis memperluas ruang partisipasi bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili, khususnya pemuda dan perempuan. Pendekatan afirmatif seperti forum musyawarah tematik, pelibatan organisasi pemuda dan kelompok perempuan, serta peningkatan kapasitas melalui pendidikan politik lokal dapat menjadi instrumen efektif untuk memperluas representasi. Integrasi kearifan lokal dalam setiap tahapan perencanaan juga penting agar kebijakan tetap selaras dengan nilai budaya masyarakat adat. Literatur mengenai *best practices* tata kelola inklusif dan pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa keberhasilan partisipasi ditentukan oleh kombinasi antara institusi formal yang terbuka, pengakuan terhadap struktur sosial lokal, serta mekanisme deliberatif yang egaliter dan berkelanjutan. Meskipun demikian, studi ini memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan wilayah yang terfokus pada satu kampung sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Variasi sosial, budaya, dan kapasitas kelembagaan di kampung lain di Merauke atau Papua Selatan dapat menghasilkan dinamika partisipasi yang berbeda. Secara teoretis, temuan ini memperkaya diskursus mengenai tata kelola inklusif dengan menegaskan pentingnya integrasi antara institusi formal dan struktur adat dalam konteks masyarakat lokal. Secara praktis, kajian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk merancang model partisipasi yang adaptif terhadap karakteristik komunitas adat. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif antar kampung atau wilayah perbatasan guna memperdalam pemahaman mengenai variasi praktik partisipasi dan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adat Kampung Kweel dalam perencanaan pembangunan daerah berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti musyawarah kampung, keterlibatan dalam penentuan prioritas anggaran, dan peran tokoh adat sebagai mediator antara pemerintah kampung dan masyarakat. Tingkat partisipasi bervariasi, dengan tokoh adat dan warga dewasa lebih aktif dibandingkan pemuda dan perempuan. Hambatan partisipasi muncul dari keterbatasan informasi, akses geografis, dan norma sosial-budaya, sementara faktor pendukungnya meliputi kepemimpinan inklusif aparat kampung, dukungan tokoh adat, dan media lokal. Partisipasi ini berdampak positif terhadap relevansi program pembangunan, rasa kepemilikan masyarakat, dan keberlanjutan proyek, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah kampung. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi penting adalah meningkatkan sosialisasi mekanisme perencanaan, memperluas keterlibatan pemuda dan perempuan, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam setiap tahap pembangunan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih inklusif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Da Cunha, Theresia Emilia Beci. 2025. "Potensi Kearifan Lokal Kabupaten Sikka Dalam Pembangunan Hukum Kepariwisata." *Journal Evidence Of Law* 4(2):505–14.
- Katayu, Damianus. 2025. "Partisipasi Masyarakat Dan Keterlibatan Komunitas Adat Dalam Proses Kebijakan Publik Di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris Di Merauke." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1(4):1716–28.
- Al Ma'ruf, Muhammad Khabib, Alya Zulfana Rahman, Restu Adiningtyas, Ayu Ananda, and Ilhan Fauzi.

2024. "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4(2):159–79.
- Riyanto, Pulung, Hidayat Humaid, Beatus Tambaip, Moch Asmawi, and Johansyah Lubis. 2024. "Education and Welfare: The Role of Public Policy in Equalizing Educational Opportunities for the South Papua Generation." *KnE Social Sciences* 574–88.
- Syahrudin, Syahrudin, Nur Jalal, Marthen A. I. Nahumury, Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 8(3):576–86.
- Tambaip, Beatus, Pulung Riyanto, Alexander Phuk Tjilen, Ilmu Administrasi Negara, and Universitas Musamus. 2024. "Penguatan Sistem Manajemen SDM Untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan Di Lingkungan Desa." 1(10):1611–19.
- Tambaip, Beatus, and Alexander Phuk Tjilen. 2023a. "Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan Di Papua." *Jurnal Kebijakan Publik* 14(1):101–10.
- Tambaip, Beatus, and Alexander Phuk Tjilen. 2023b. "Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Musamus Journal of Public Administration* 5(02):410–20.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023a. "Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke." *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6(1):97–106.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023b. "Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 5(1):1–9.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2025. "Transformative Leadership in Equitable Public Management: Advancing Educational Access and Quality in South Papua." *Journal of Ecohumanism* 4(2):1117–31.
- Tjilen, Alexander Phuk, Willyan Sahetapy, Beatus Tambaip, and Martha Betaubun. 2022. "Ecotourism Development Policy, Supporting Capacity and Development of Sustainable Tourism Facilities and Infrastructure in Raja Ampat Regency, West Papua Province." *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 4(03).
- Tjilen, Alexander Phuk, Beatus Tambaip, Budi Dharmawan, Adrianus Adrianus, Pulung Riyanto, and Yosephina Ohoiwutun. 2024. "Engaging Stakeholders in Policy Decision-Making for Food Security Governance: Identification, Perception, and Contribution." *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 8(1):144–54. doi:10.22495/cgobrv8i1p12.
- Tjilen, Alexander Phuk, Beatus Tambaip, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Paul Adryani Moento, and Erwin Nugraha Purnama. 2023. "Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(2):257–62.
- Tjilen, Alexander Phuk, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Samel Watina Ririhena, Beatus Tambaip, Syahrudin Syahrudin, Yosephina Ohoiwutun, and Riska Dwi Prihandayani. 2023. "Optimalisasi Potensi Desa Wisata Melalui Manajemen Pengelolaan Yang Berkelanjutan: Kontribusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal." *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2(6):38–49.
- Yaluwo, Hengki, Alexander Tjilen, Beatus Tambaip, and Fransin Kontu. 2024. "DECENTRALIZATION AND WELFARE: EVALUATING THE ECONOMIC PERFORMANCE POST-TERRITORIAL DIVISION IN BOVEN DIGOEL REGENCY, PAPUA PROVINCE, INDONESIA." *AGPE THE ROYAL GONDWANA RESEARCH JOURNAL OF HISTORY, SCIENCE, ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE* 5(4):17–36.